

# PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA LESTARI DI DESA PUSAKASARI KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS

Dayu Rizki Ramdhani<sup>1</sup>, Aan Anwar S<sup>2</sup>, Otong Husni Taufiq<sup>3</sup>

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>1,2,3</sup>*

E-mail: abieabraham@gmail.com

## ABSTRAK

*Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh UPPKS Lestari terhadap masyarakat penerima bantuan di Desa Pusakasari?, 2) Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh UPPKS Lestari dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat penerima bantuan di Desa Pusakasari?, 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh UPPKS Lestari dalam hal sosialisasi dan pelatihan guna meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat di Desa Pusakasari?. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh UPPKS Lestari terhadap masyarakat penerima bantuan di Desa Pusakasari, 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh UPPKS Lestari terhadap masyarakat penerima bantuan di Desa Pusakasari. 3) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh UPPKS Lestari guna meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat di Desa Pusakasari. Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah: 1) Masyarakat yang mengikuti pemberdayaan masyarakat. 2) Pemerintah desa yang mendukung dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan belum dilakukan secara maksimal sepenuhnya terutama dalam Bina Lingkungan dan Bina Kelembagaan, hal ini dikarenakan terbatasnya SDM, tidak adanya perencanaan dan penjadwalan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembinaan yang dilakukan sehingga hasil dari pelaksanaannya pemberdayaan yang dilakukan menjadi kurang maksimal dan output yang dihasilkan menjadi tidak jelas.*

**Kata Kunci:** *Pemberdayaan, Bina Manusia, Bina Lembaga, Bina Usaha, Bina Lingkungan.*

## PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1).

Dengan demikian dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya otonomi yang dimiliki Desa. Artinya desa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari masyarakatnya sendiri, dengan demikian desa memiliki posisi sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang dalam menyelenggarakan otonomi daerah, karena dengan kuat dan mantapnya desa akan mempengaruhi secara langsung perwujudan otonomi daerah. Merujuk pada pemikiran semacam itu maka pemikiran yang menjadi landasan dalam pengaturan pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi. Dalam konteks demikian maka pengembangan otonomi asli desa memiliki landasan, visi dan misi yang kuat dalam rangka menjaga efektivitas, efisiensi dan optimalisasi otonomi daerah.

Salah satu tujuan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan diantaranya adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat desa. Adanya program pemberdayaan juga diharapkan masyarakat desa dapat lebih berkembang dan memiliki potensi sehingga mampu bersaing dengan masyarakat kota dan mampu meningkatkan perekonomian desa sehingga akan menekan angka urbanisasi.

Pandangan Soetomo (2018:89) berpendapat bahwa “melalui proses pemberdayaan, negara harus memberikan sebagian kewenangannya atau sebagian powernya kepada masyarakat”. Prioritas utama dalam kesejahteraan sosial adalah kelompok-kelompok kurang beruntung, khususnya keluarga miskin, dimana dalam kesejahteraan sosial ini, dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberdayaan. Pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008:85) adalah proses, cara, membuat, memberdayakan dari kata daya yaitu kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak. Pemberdayaan dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat meliputi kesejahteraan keluarga, memandirikan masyarakat miskin, mengangkat harkat dan martabat masyarakat lapisan bawah, menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam bertindak. Pemberdayaan dapat dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah setempat.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat diperlukan adanya pemberdayaan masyarakat guna mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan

yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Dari hasil observasi peneliti di lapangan, nampak bahwa pemberdayaan yang telah dilakukan di desa belum dapat memberikan manfaat dan efek yang besar bagi masyarakat. Permasalahan tersebut di atas, diduga disebabkan oleh program pemberdayaan masyarakat yang belum dilakukan dengan baik. Hal ini disebabkan dengan indikator permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Masyarakat kurang menyadari dan memahami akan pentingnya pemberdayaan, serta pemilihan materi dan tema pemberdayaan yang kurang tepat sehingga program pemberdayaan yang dilaksanakan menjadi kurang tepat sasaran karena program pemberdayaan yang dilakukan bukanlah program yang sepenuhnya diinginkan oleh masyarakat selain itu banyak masyarakat yang tidak tahu bagaimana memanfaatkan sumber daya alam yang ada agar bisa meningkatkan kesejahteraan perekonomian keluarga hal tersebut terbukti dari kondisi di lapangan mengenai kegiatan pemberdayaan yang sudah dilakukan hanya sebatas sosialisasi semata tanda adanya tindak lanjut ataupun output dari hasil pemberdayaan tersebut serta masyarakat tidak termotivasi untuk meningkatkan kreatifitas dan menindaklanjuti hasil pemberdayaan

guna meningkatkan perekonomiannya.

2. Pelaksanaan program pemberdayaan yang tidak dilakukan secara maksimal. Selain itu usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Lestari belum memberikan sosialisasi dan pelatihan menyeluruh kepada masyarakat terkait pemberdayaan sehingga masih banyak masyarakat yang belum bisa memanfaatkan bantuan dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan perekonomian keluarga.

Penentuan sasaran program pemberdayaan yang tidak disesuaikan dengan materi pemberdayaan, sehingga program pemberdayaan dilaksanakan sekedar kegiatan semata tanpa melakukan penjaminan mengenai ketercapaian dari hasil pemberdayaan tersebut selain itu usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Lestari selaku pelaksana pemberdayaan belum bekerja dengan baik karena belum adanya evaluasi dari Kepala Desa.

## **KAJIAN PUSTAKA**

UPPKS atau Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera merupakan turunan dari program KB. UPPKS adalah sarana untuk meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga peserta program KB. Melalui program UPPKS, pemerintah memberikan bantuan penguatan modal yang bersifat pinjaman kepada masyarakat tersebut. Dengan pinjaman tersebut harapannya masyarakat penerima bantuan dapat menggunakan

untuk menciptakan usaha baru maupun memperbesar modal atas usaha yang dimilikinya agar kesejahterannya meningkat. Bagi wilayah dengan tingkat kesertaan KB yang masih rendah, UPPKS juga memiliki daya ungkit terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesertaan dalam program KB (BKKBN, 2009).

Diketahui bahwa Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) memiliki tujuan sebagai berikut (BKKBN, 2019):

1. Mengajak keluarga aktif bergerak dalam ekonomi produktif,
2. Mensosialisasikan pengelolaan keuangan keluarga,
3. Meningkatkan ketahanan dan kemandirian keluarga,
4. Mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Jadi, dalam hal ini UPPKS sebaiknya bisa mendukung, mengajak, memfasilitasi dan mendampingi para anggotanya dalam memanfaatkan segala sumber daya lokal (bahan baku, keahlian / kemampuan anggota, permintaan pasar, sumber pembiayaan dan lain-lain) untuk kegiatan pembelajaran serta meningkatkan kegiatan ekonomi produktif sehingga menjadikan perekonomian masyarakat lebih sejahtera.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2006:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian

yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Adapun Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2006:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (dalam Moleong 2006:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Menurut Nazir (1983), penelitian deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, melukiskan secara tepat sifatsifat dari beberapa fenomena kelompok atau individu, menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalkan bias dan memaksimalkan reabilitas. Analisnya dikerjakan berdasarkan *ex post facto*, artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian berlangsung (Nazir, 1983:105).

Metode deskriptif umumnya memiliki 2 ciri khas utama: (1) memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada sekarang; (2) data yang dikumpulkan pertama kali disusun, dijelaskan kemudian dianalisa

karena itu metode deskriptif sering disebut metode analisa. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok-kelompok tertentu atau menemukan penyebaran (frekuensi) suatu gejala dan gejala lainnya dalam masyarakat.

Menurut Singarimbun (1982:4), bahwa penelitian deskriptif biasa dilakukan tanpa hipotesa yang dirumuskan secara ketat. Ia mengontrol juga hipotesa tetapi tidak akan diuji secara statistik. Selain itu ia mempunyai 2 tujuan untuk mengetahui perkembangan sarana fisik dan frekuensi kerjanya suatu aspek fenomena sosial.

Dengan pemilihan rancangan deskriptif kualitatif, maka penulis akan melakukan pendekatan terhadap obyek penelitian dengan menggali informasi sesuai dengan persepsi penulis dan informan dan dapat berkembang sesuai dengan interaksi yang terjadi dalam proses wawancara. Penulis senantiasa menginterpretasikan makna yang tersurat dan tersirat dari penjelasan yang diberikan informan, hasil observasi lapangan serta catatan pribadi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintahan Desa Pusakasari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis**

#### **1. Dimensi Bina Usaha**

Bina usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan, sebab bina manusia yang tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi dan atau ekonomi) tidak akan laku, dan bahkan menambah kekecewaan. Sebaliknya hanya bina manusia yang mampu memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan yang akan laku memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat.

Untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan dalam bina usaha, dilakukan penelitian dan wawancara berdasarkan indikator-indikator yang sesuai dengan dimensi tersebut. Indikator yang termasuk kedalam bina usaha diantaranya adalah sebagai berikut:

#### **a. Melakukan identifikasi terhadap potensi usaha**

Proses identifikasi merupakan dasar dari penggalian potensi usaha yang akan dilakukan pembinaan. Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan penulis menyimpulkan bahwa proses identifikasi mengenai potensi usaha yang dilakukan terhadap UPPKS Lestari di Desa Pusakasari belum dilakukan dengan maksimal. Hal tersebut terlihat dari penyajian data yang bukan didasari dari pendataan secara langsung sehingga menjadikan kualitas data yang tersedia menjadi kurang.

**b. Memberikan pembinaan dan pelatihan secara berkesinambungan terhadap wirausaha kecil**

Setelah dilakukan identifikasi mengenai potensi usaha yang terdapat pada UPPKS Lestari Desa Pusakasari, selanjutnya dengan berbekal data tersebut, pemerintah desa melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap para wirausaha tersebut. Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan penulis menyimpulkan bahwa langkah pemerintah dalam melakukan pembinaan masih terdapat banyak sekali kekurangan terutama dalam pelibatan masyarakat dimulai dari perencanaan desa hingga pelaksanaannya.

**c. Melakukan monitoring terhadap perkembangan usaha dalam tahap pembinaan**

Setelah proses identifikasi dan pemantauan potensi dari masyarakat Desa Pusakasari, selanjutnya peneliti melakukan penelitian pada indikator dalam melakukan monitoring terhadap perkembangan usaha yang berada dalam tahap pembinaan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dipaparkan di atas penulis menyimpulkan bahwa monitoring yang dilakukan terhadap usaha yang terbilang tidak ada hal yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan sebatas mengajak ngobrol tanpa formal mengenai perkembangan UPPKS.

**d. Melakukan evaluasi terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam usaha masyarakat**

Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa evaluasi yang dilakukan terhadap usaha yang dibina, sama sekali tidak dilakukan. Hal tersebut dikarenakan tidak ada perencanaan yang terprogram untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap UPPKS.

**2. Bina Manusia**

**a. Melakukan identifikasi terhadap potensi SDM**

Selain bina usaha, hal yang dilakukan dalam pelaksanaan pemberdayaan desa yaitu melakukan bina manusia. Salah satu indikator dalam bina manusia diantaranya adalah melakukan identifikasi terhadap potensi SDM. Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dipaparkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa identifikasi SDM yang dilakukan diantaranya dengan melakukan sensus atau pendataan dimulai dari pendidikan, mata pencaharian dan usaha masyarakat desa untuk selanjutnya dilakukan sinkronisasi dengan program pemerintah yang ada.

**b. Memberikan pembinaan dan pelatihan secara berkesinambungan terhadap SDM yang kurang berkembang**

Setelah dilakukan identifikasi mengenai potensi SDM yang terdapat pada pengelola UPPKS Lestari desa Pusakasari, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah memberikan pembinaan dan pelatihan yang berkesinambungan terhadap SDM yang kurang berkembang. Berdasarkan

wawancara dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan dalam meningkatkan SDM yang kurang berkembang yang dilaksanakan di desa Pusakasari kurang terencana dengan baik, hal tersebut dikarenakan kurang teridentifikasi dengan baik mengenai potensi SDM tersebut.

**c. Melakukan monitoring terhadap perkembangan SDM dalam tahap pembinaan**

Pemantauan terhadap suatu pelaksanaan memang sangat penting, apalagi dalam hal SDM masyarakat desa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan monitoring yang dilakukan terhadap pembinaan SDM yang kurang berkembang belum dilakukan dengan baik, hal tersebut terlihat dari kurang terencananya konsep yang dilakukan untuk melakukan monitoring tersebut.

**d. Melakukan evaluasi terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan SDM masyarakat**

Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dipaparkan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada langkah yang dilakukan dalam melakukan evaluasi terhadap pembinaan SDM para pengelola UPPKS Lestari.

**3. Bina Lingkungan**

**a. Melakukan identifikasi terhadap kondisi lingkungan**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dipaparkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa identifikasi lingkungan yang dilakukan terhadap UPPKS Lestari Desa Pusakasari perlu dilaksanakan lebih maksimal lagi dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Hal tersebut agar seluruh data yang diinginkan sesuai dengan apa yang telah direncanakan pada musyawarah desa.

**b. Menyusun program pembinaan lingkungan**

Untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dalam melakukan penyusunan program dalam pembinaan lingkungan, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pelaksanaan penyusunan program pembinaan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dikarenakan program UPPKS berjalan dengan sendirinya dan terkesan jalan ditempat.

**c. Melakukan monitoring terhadap perkembangan pembinaan lingkungan**

Pelaksanaan monitoring merupakan hal yang paling penting dalam tingkatan manajemen. Tanpa dilakukannya monitoring yang baik maka seluruh program yang direncanakan tidak akan terealisasi sesuai dengan harapan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang

telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pelaksanaan monitoring yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa hanya dibebankan kepada salah satu pihak tanpa adanya sinergitas berbagai pihak. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan dari berbagai hal dalam melakukan hal tersebut.

#### **d. Melakukan evaluasi terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan lingkungan**

Tahapan akhir dalam tingkatan manajemen yaitu pelaksanaan evaluasi dari seluruh tahapan yang telah dilaksanakan. Tanpa adanya evaluasi, seorang pimpinan tidak akan dapat mengambil kebijakan apapun. Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dipaparkan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan evaluasi yang tidak dilakukan oleh pemerintahan desa sebatas wacana yang dilakukan dalam musyawarah semata, hal tersebut tidak terealisasi dalam pelaksanaan evaluasi tersebut. Hal demikian diakibatkan dari kurangnya koordinasi antara masyarakat dengan pemerintahan desa sehingga pemerintahan desa tidak mengetahui apakah program UPPKS Lestari yang dilaksanakan sudah berhasil atau tidak.

### **4. Bina Lembaga**

#### **a. Melakukan identifikasi terhadap lembaga yang mendukung terhadap perkembangan desa**

Melakukan kerjasama dengan instansi yang mendukung terhadap pemerintahan desa memang sangat

penting, hal tersebut akan menciptakan suasana yang saling mendukung sehingga perkembangan desa menjadi desa mandiri akan semakin cepat. Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dipaparkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa identifikasi lembaga yang dilakukan diantaranya dengan melakukan pendataan dimulai dari kontribusi lembaga tersebut dan jenis kontribusi yang dilakukan oleh lembaga terhadap desa.

#### **b. Melakukan koordinasi dan kerjasama terhadap lembaga yang mendukung perkembangan desa**

Setelah dilakukan identifikasi mengenai lembaga yang mendukung terhadap perkembangan UPPKS, selanjutnya lembaga tersebut haruslah memiliki ikatan yang pasti hubungannya dengan UPPKS supaya dapat saling terintegrasi satu sama lain. Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dipaparkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama dan koordinasi mengenai lembaga yang berkontribusi terhadap UPPKS tidak dilakukan dengan baik. Hal tersebut disebabkan dari kurangnya pemahaman atas kelembagaan dan kerjasama yang dilakukan.

#### **c. Melakukan monitoring terhadap perkembangan lembaga dalam tahap pembinaan**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan monitoring yang dilakukan terhadap lembaga yang berkontribusi ke desa



belum dilaksanakan secara administratif sehingga kerjasama antara desa dan lembaga tidak terinfentarisir dengan baik.

#### **d. Melakukan evaluasi terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan lembaga**

Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dipaparkan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa langkah yang dilakukan dalam melakukan evaluasi terhadap pembinaan lembaga diantaranya dengan melakukan analisa terhadap kontribusi yang telah dilakukan namun hal tersebut masih belum didokumentasikan secara administrasi sehingga sulit menentukan kebijakan yang harus diambil.

#### **Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pusakasari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis**

Berbagai pengertian mengenai pemberdayaan yang diungkapkan oleh beberapa pakar pemberdayaan pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama, namun dalam hal ini peneliti memaparkan pengertian penelitian yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, M.S (2012:100) yang dipaparkan dalam penelasannya berikut ini:

Pemberdayaan merupakan proses social, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholder (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat

dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.

Berdasarkan pada hal tersebut, kemudian penulis dapat menjelaskan hasil wawancara setiap informan penelitian dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti selama di lapangan mengenai pelaksanaan pemberdayaan desa Pusakasari dengan mengacu kepada dimensi berikut ini:

#### **1. Bina Usaha**

Pemaparan mengenai Bina usahayang dijelaskan oleh prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto (2012:114) yang menyatakan bahwa:

Bina usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan, sebab bina manusia yang tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi dan atau ekonomi) tidak akan laku, dan bahkan menambah kekecewaan. Sebaliknya hanya bina manusia yang mampu memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan yang akan laku memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dan teori di atas, diketahui bahwa pelaksanaan identifikasi potensi usaha sudah dilaksanakan dengan cukup baik oleh pemerintahan Desa Pusakasari namun dalam hal ini dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelatihan dan pembinaan serta terhadap pelaku usaha yang telah dibina belum

dilakukan berdasarkan ketentuan tatanan manajemen yang seharusnya. Hal ini terlihat dari tidak adanya perencanaan yang baik mengenai pelaksanaan monitoring yang dilakukan terhadap usaha yang telah dilakukan pembinaan serta tidak adanya jadwal evaluasi yang dilakukan terhadap usaha yang telah dibina.

## **2. Bina Manusia**

Penjelasan mengenai Bina Manusia dijelaskan oleh prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto (2012:114) yang menyatakan bahwa:

Disamping itu, dalam ilmu manajemen, manusia menempati unsur yang paling unik, sebab selain sebagai salah satu sumberdaya yang sekaligus sebagai pelaku pengelola manajemen itu sendiri termasuk dalam bina manusia, adalah semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan/pengembangan kapasitas.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dan teori di atas, diketahui bahwa pelaksanaan bina manusia yang dilakukan pada pelaksanaan pemberdayaa di desa Pusakasari belum mampu mencapai tujuan dari pemberdayaan dengan maksimal terutama dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan bina manusia yang tidak dilakukan sepenuhnya terutama dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap masyarakat yang telah melakukan pelatihan dan pembinaan.

## **3. Bina Lingkungan**

Sebagaimana dijelaskan oleh prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto (2012:115) yang menyatakan bahwa:

Selama ini, pengertian lingkungan, seringkali dimaknai sekedar lingkungan fisik, utamanya yang menyangkut pelestarian sumberdaya alam dan pelestarian hidup. Tetapi dalam praktek perlu disadari bahwa lingkungan social juga sangat berpengaruh terhadap berkelanjutan bisnis dan kehidupan.

## **KESIMPULAN**

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dan teori di atas, diketahui bahwa pelaksanaan bina pelaksanaan bina lingkungan yang dilakukan sebagai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Pusakasari belum dilaksanakan dengan maksimal hal tersebut terlihat dari pelaksanaan identifikasi lingkungan yang belum terakomodir dengan baik dikarenakan, pembinaan lingkungan yang tidak menjadi prioritas terutama lingkungan social serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang tidak dilaksanakan sepenuhnya, hal tersebut mengakibatkan dari tujuan pemberdayaan yang dilakukan menjadi tidak tercapai.

Seperti yang dipaparkan oleh prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto (2012:114) sebagai berikut:

....., bahwa tersedianya dan evektivitas kelembagaan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan bina usaha, bina manusia

dan bina lingkungan. Pengertian kelembagaan seringkali dimaknai dalam arti sempit sebagai beragam bentuk lembaga (kelompok, organisasi) tetapi kelembagaan memiliki arti yang sangat luas.

Kata kelembagaan sering dikaitkan dengan dua pengertian, yaitu “*social institution*” atau pranata-sosial dan “*social organization*” atau organisasi sosial.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dan teori diatas, diketahui bahwa pelaksanaan bina lembaga yang dilakukan di Desa Pusakasari belum mampu memaksimalkan tujuan pelaksanaan pemberdayaan dalam hal peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh Sulistyani, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ginanjar, Kartasasmita. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. PT. Pustaka Cidesindo ; Jakarta.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: RinekaCipta
- Mardikanto, Totok. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, j, Lexy. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya.
- Nasution. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, bandung: Tarsito.
- Nawawi, Hadari dan M. Martini Hadari. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada
- Nazir, Muhammad. 1983. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Pranarka, A. M. W. dan Vidhandika Moeljarto, 1996. *Pemberdayaan (Empowerment): Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Rusmiyati. 2011. *Instructional Technology and Media. For Laerning*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Sedarmayanti. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika.
- Singarimbun. 1982. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta : CV. Rajawali.
- Soetomo. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Suharto, Edi. Membangun masyarakat memberdayakan rakyat, bandung:Refika*
- Sumodiningrat, Gunawan, 2002. Memberdayakan Masyarakat Perencana kencana. Jakarta: Nusadwina.*
- Suryana. 2010. Data dan Jenis Data Penelitian. Diakses pada tanggal*
23. Maret 2019 jam 18.28  
<http://csuryana.wordpress.com>.
- Tricahyono, Sunit Agus. 2008. Pemberdayaan Komunitas Terpencil di Provinsi NTT. Yogyakarta: B2P3KS.*